

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Jakarta Utara dalam Mengatasi Masalah Banjir Rob di Wilayah Penjaringan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya dalam penanganan banjir rob melalui berbagai kebijakan, program, dan koordinasi antarinstansi. Peran tersebut dianalisis berdasarkan teori peran pemerintah daerah yang meliputi fungsi regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Secara umum, keempat peran tersebut telah dijalankan oleh pemerintah daerah, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam mengurangi risiko banjir rob di wilayah Penjaringan.

Dalam peran sebagai regulator, Pemerintah Daerah Jakarta Utara telah memiliki dasar kebijakan dan perencanaan yang cukup jelas dalam penanganan banjir rob, seperti melalui dokumen perencanaan daerah serta dukungan terhadap program pengendalian banjir pesisir. Keberadaan kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mengendalikan risiko banjir rob. Namun, pada tahap implementasi masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pembangunan infrastruktur, keterbatasan anggaran, serta kompleksitas pembagian kewenangan antarinstansi yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Sebagai fasilitator, pemerintah telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mengurangi dampak banjir rob, seperti pembangunan dan peninggian tanggul, penyediaan pompa air, serta perbaikan sistem drainase. Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi struktural yang bertujuan mengendalikan genangan air di wilayah permukiman pesisir. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur tersebut belum merata di seluruh wilayah yang terdampak sehingga masih terdapat kawasan yang rentan terhadap banjir rob.

Dalam peran sebagai dinamisator, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan perangkat wilayah seperti RT dan RW. Upaya ini

bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko banjir rob serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Namun, tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat masih berbeda di setiap wilayah, sehingga perlu adanya peningkatan intensitas sosialisasi dan pendekatan yang lebih berkelanjutan kepada masyarakat pesisir.

Sementara itu, dalam peran sebagai katalisator, pemerintah berupaya mempercepat pelaksanaan program mitigasi banjir rob melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait serta pelaksanaan program pengendalian banjir di wilayah pesisir. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan kompleksitas permasalahan lingkungan seperti penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Jakarta Utara telah menjalankan perannya dalam penanganan banjir rob di wilayah Penjaringan melalui berbagai kebijakan, program infrastruktur, serta upaya pelibatan masyarakat. Namun efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek implementasi kebijakan, pemerataan infrastruktur pengendalian banjir, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana.

## **5.2 Keterbatasan penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, sehingga temuan yang diperoleh sangat bergantung pada persepsi dan pengalaman informan. Meskipun data telah diperoleh dari berbagai pihak, hasil penelitian ini belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh pandangan masyarakat pesisir di wilayah Penjaringan.

Kedua, penelitian ini berfokus pada wilayah Penjaringan sebagai lokasi studi kasus, sehingga temuan penelitian bersifat kontekstual dan merefleksikan kondisi spesifik wilayah tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara langsung ke wilayah pesisir lain di Jakarta maupun daerah pesisir lainnya yang memiliki karakteristik sosial, lingkungan, dan kebijakan yang

berbeda. Keterbatasan ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu konteks tertentu.

### **5.3 Implikasi penelitian**

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penerapan teori peran pemerintah daerah menurut Arif dalam konteks penanganan banjir rob di wilayah pesisir perkotaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keempat peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator tidak dapat berjalan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor internal serta eksternal.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan banjir rob, khususnya terkait kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penataan ruang dan mitigasi bencana di wilayah pesisir yang rawan terhadap dampak perubahan iklim.

### **5.4 Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan mengenai peran Pemerintah Daerah Jakarta Utara dalam mengatasi masalah banjir rob di wilayah Penjaringan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

#### **1. Penguatan Implementasi Kebijakan dan Infrastruktur**

Pemerintah Daerah Jakarta Utara disarankan untuk memperkuat implementasi kebijakan pengendalian banjir rob dengan memastikan realisasi pembangunan infrastruktur pengendali banjir berjalan secara konsisten dan merata. Fokus percepatan perlu diarahkan pada wilayah permukiman pesisir yang hingga saat ini masih sering terdampak banjir rob. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah yang belum terlindungi oleh tanggul maupun fasilitas pendukung lainnya, sehingga pemerataan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak.

#### **2. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Kewenangan**

Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan, khususnya dengan instansi atau pihak yang memiliki otoritas di kawasan pesisir seperti pelabuhan, kawasan industri, dan kawasan wisata. Penguatan koordinasi ini penting untuk mengatasi kendala kewenangan yang selama ini menghambat pembangunan tanggul pantai di beberapa titik wilayah pesisir. Dengan koordinasi yang lebih kuat, program pengendalian banjir rob seperti NCICD dan rencana pengendalian jangka panjang lainnya diharapkan dapat direalisasikan secara lebih optimal dan tepat sasaran.

### **3. Penguatan Sosialisasi dan Pelibatan Masyarakat**

Dalam menjalankan peran sebagai fasilitator dan dinamisator, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi serta pelibatan masyarakat secara berkelanjutan hingga ke tingkat RT dan RW. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat sosialisasi dan partisipasi masyarakat antarwilayah. Pelibatan masyarakat secara aktif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesiapsiagaan, serta kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi banjir rob yang dipicu oleh penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.

### **4. Peningkatan Kesiapsiagaan Darurat Banjir Rob**

Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kesiapsiagaan darurat melalui penyediaan sarana pendukung penanggulangan banjir rob, seperti perahu karet, jalur evakuasi, dan fasilitas darurat lainnya di wilayah yang masih rentan terdampak. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat masyarakat yang menyampaikan keterbatasan sarana darurat saat banjir rob terjadi. Oleh karena itu, penguatan kesiapsiagaan darurat perlu menjadi bagian dari strategi mitigasi non-struktural guna mengurangi risiko terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat.

## 5. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian tidak hanya terbatas pada Kecamatan Penjaringan, tetapi juga mencakup wilayah pesisir lain di Jakarta Utara yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat dipertimbangkan untuk mengukur efektivitas kebijakan, infrastruktur, serta koordinasi antarinstansi secara lebih terukur. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi mitigasi banjir rob yang diterapkan pemerintah daerah.

